

PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI ASN DI BKPSDM HULU SUNGAI SELATAN

Oleh :

Siti Sarah Zainab¹⁾, Normajatun²⁾, Abdul Haliq³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
email: Sitie3795@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 1 Agustus 2026

Revisi, 15 September 2026

Diterima, 16 September 2026

Publish, 17 September 2026

Kata Kunci :

Kualitas Sistem,
Sistem Informasi Kepegawaian,
Efektivitas Pelayanan Administrasi,
ASN.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi kepegawaian terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kualitas sistem informasi kepegawaian diukur menggunakan model DeLone dan McLean (2003) yang meliputi kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, sedangkan efektivitas pelayanan administrasi ASN diukur menggunakan teori Penning dan Steers (1977) yang terdiri atas indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada seluruh pegawai BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjumlah 33 orang responden, dengan sampel ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Sebelum pengujian hipotesis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya, serta dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi kepegawaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN, dengan nilai t hitung sebesar 9,958 lebih besar dari t tabel 2,040 pada signifikansi 0,000. Tingkat korelasi antara kedua variabel berada pada kategori sangat kuat, yang berarti semakin baik kualitas sistem informasi kepegawaian yang diterapkan maka akan semakin tinggi pula efektivitas pelayanan administrasi ASN yang dihasilkan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,762 menunjukkan bahwa kontribusi variabel kualitas sistem informasi kepegawaian terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN tergolong sangat besar, yaitu sebesar 76,2%, sedangkan sisanya sebesar 23,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sistem informasi kepegawaian secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan administrasi ASN yang lebih efektif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Siti Sarah Zainab

Afiliasi: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Email: Sitie3795@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pelayanan publik, yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan

efisien. Di antara berbagai bentuk pelayanan tersebut, pelayanan administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menempati posisi strategis karena menyangkut pengelolaan sumber daya manusia—mulai dari

pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, hingga pensiun—yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Landasan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 dengan menegaskan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk memberikan layanan yang berkualitas, cepat, dan efisien. Di sisi lain, hadirnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) turut mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu jalan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Salah satu wujud nyata implementasi SPBE dalam pelayanan administrasi ASN adalah hadirnya sistem informasi kepegawaian, yang diharapkan mempercepat pengelolaan data pegawai, menekan kesalahan input data, dan pada akhirnya turut mendorong kinerja pelayanan. Kerangka teori yang banyak dipakai untuk menilai keberhasilan sebuah sistem informasi adalah model yang dikembangkan DeLone dan McLean (2003); Pratama (2024), misalnya, membuktikan model tersebut masih relevan ketika diterapkan pada evaluasi sistem informasi di instansi kepegawaian daerah (BKPSDM Kota Jambi), di mana faktor-faktor penentu dalam model itu terbukti tetap menjadi kunci keberhasilan layanan berbasis sistem informasi publik. Riset-riset terdahulu pun konsisten memperlihatkan keterkaitan antara mutu sebuah sistem informasi dengan tingkat kepuasan penggunaannya serta kelancaran pelayanan yang dihasilkan, sebab sistem yang baik mempercepat proses sekaligus menjaga akurasi data yang diolah.

Salah satu tolok ukur keberhasilan sebuah organisasi adalah seberapa efektif ia menjalankan pelayannya. Merujuk pandangan Pennings dan Steers (1977) mengenai efektivitas organisasi, capaian tersebut tidak lepas dari peran perangkat pendukung yang digunakan—termasuk sistem informasi. Pada layanan administrasi kepegawaian, sistem yang mumpuni memudahkan organisasi memenuhi targetnya, mempererat koordinasi lintas bagian, sekaligus membuat organisasi lebih lincah menyesuaikan diri dengan kebutuhan layanan yang terus berubah. Singkatnya, mutu sistem informasi dan capaian efektivitas pelayanan berjalan beriringan dalam mewujudkan layanan administrasi ASN yang prima.

Di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri, sistem informasi kepegawaian telah dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan administrasi ASN. Meski demikian, pengamatan awal masih memperlihatkan sejumlah kendala, mulai dari proses pelayanan yang belum sepenuhnya cepat, kesalahan data, gangguan teknis pada sistem, hingga keterbatasan kemampuan sebagian pegawai dalam mengoperasikannya. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa kualitas sistem informasi yang berjalan saat ini belum sepenuhnya optimal dalam mendukung efektivitas pelayanan administrasi ASN, sehingga peningkatan kualitas sistem masih perlu terus diupayakan agar pelayanan dapat berlangsung lebih efektif.

Beberapa peneliti sebelumnya, seperti Laia et al. (2022) dan Rohaimudin et al. (2025), telah menyinggung tema sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi, tetapi pembahasannya masih berkutat pada kualitas pelayanan atau implementasi sistem secara umum. Penelitian ini mengambil posisi berbeda dengan secara spesifik menguji pengaruh kualitas sistem informasi kepegawaian terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, memakai model DeLone dan McLean berpadu dengan teori efektivitas organisasi Pennings dan Steers sebagai pisau analisis.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi kepegawaian terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran empiris mengenai kondisi kualitas sistem informasi kepegawaian, efektivitas pelayanan administrasi ASN, serta keterkaitan antara keduanya, yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi di lingkungan BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian

Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen, sistem informasi kepegawaian berfungsi mendukung pengelolaan data pegawai sekaligus penyelenggaraan pelayanan administrasi ASN. Jogiyanto H.M. (2008) mengartikan sistem informasi sebagai suatu sistem dalam organisasi yang menopang kegiatan operasional dan manajerial, sekaligus menyediakan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, keberadaan sistem informasi kepegawaian berperan besar dalam mendorong efisiensi pengelolaan data, mempercepat proses administrasi, dan menekan potensi kesalahan dalam pelayanan kepegawaian.

Model DeLone dan McLean (2003) menjadi pijakan utama penelitian ini dalam mengukur keberhasilan sistem informasi, dengan tiga dimensi pokok yang saling melengkapi. Dimensi pertama, kualitas sistem, menyoroti seberapa mudah sistem dioperasikan, seberapa cepat diakses, dan seberapa andal ia bekerja tanpa gangguan berarti. Dimensi kedua, kualitas informasi, berkaitan dengan ketepatan, kelengkapan, relevansi, dan kecepatan waktu penyajian data yang dihasilkan sistem. Dimensi ketiga, kualitas layanan, mengacu pada kesiapan pihak pengelola sistem dalam memberikan bantuan teknis kepada penggunaannya. Ketiga dimensi

ini secara bersama-sama dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas Sistem Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Efektivitas Pelayanan Administrasi ASN

Efektivitas pelayanan administrasi pada dasarnya menggambarkan sejauh mana sebuah organisasi berhasil mewujudkan target layanan yang sudah dicanangkan. Pennings dan Steers (1977) menawarkan tiga tolok ukur untuk menilainya: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi—kerangka yang masih terpakai luas hingga sekarang, termasuk oleh Khaerullah (2023) ketika menilai keberhasilan aplikasi sistem informasi manajemen aset daerah dan mendapati ketiga indikator tersebut tetap efektif untuk mengukur kinerja sistem informasi pemerintah daerah. Secara ringkas, pencapaian tujuan berbicara soal terpenuhinya target layanan; integrasi berbicara soal kelancaran koordinasi antarbagian; sementara adaptasi berbicara soal kelenturan organisasi menghadapi perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi.

Pada layanan administrasi ASN, mutu sistem informasi yang dipakai ikut menentukan seberapa efektif layanan tersebut berjalan. Sistem yang mumpuni mempercepat proses, menjaga akurasi, dan membuat pelayanan lebih hemat sumber daya, sehingga target lebih mudah tercapai, koordinasi antarunit kian solid, dan organisasi lebih siap beradaptasi terhadap kebutuhan layanan yang berubah. Bisa dikatakan, mutu sistem informasi adalah salah satu kunci pendorong efektivitas pelayanan administrasi ASN.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang digunakan, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H_0 : Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- H_1 : Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian berpengaruh terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. METODE PENELITIAN

Guna menganalisis pengaruh kualitas sistem informasi kepegawaian terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penelitian ini menempuh pendekatan kuantitatif berjenis asosiatif kausal (Sugiyono, 2023), mengingat sasarannya adalah menguji hubungan sebab-akibat antarvariabel secara objektif lewat kaidah statistik. Variabel yang diteliti

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Sebagaimana tervisualisasi pada Gambar 1, variabel X dan Y masing-masing dijabarkan ke dalam tiga indikator turunan sesuai kerangka teori yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka. Bagan inilah yang menjadi rujukan dalam menyusun kisi-kisi instrumen penelitian sekaligus menentukan arah pengujian hipotesis pengaruh kualitas sistem informasi kepegawaian terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjumlah 33 orang. Karena jumlahnya tergolong kecil, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh (*sensus*), sehingga seluruh anggota populasi turut menjadi responden penelitian (Sugiyono, 2023). Data primer dihimpun melalui penyebaran kuesioner berskala Likert, sedangkan data pendukung diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan studi pustaka guna melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Pengolahan seluruh data bersandar pada aplikasi IBM SPSS Statistics versi 27. Langkah awal berupa pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, memastikan tiap butir pernyataan kuesioner memang layak menjadi alat ukur. Setelahnya, data diperiksa melalui serangkaian uji prasyarat—normalitas sebaran, ada-tidaknya multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi—sebelum akhirnya masuk ke tahap regresi linear sederhana. Pada tahap pengujian hipotesis, uji *t* dipakai untuk melihat ada-tidaknya pengaruh kualitas sistem

informasi kepegawaian terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN, sedangkan besaran kontribusi variabel X terhadap Y dilihat lewat nilai koefisien determinasi (R^2). Sebagai pelengkap, kondisi masing-masing variabel turut digambarkan melalui analisis deskriptif persentase atas jawaban responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Sebanyak 33 pegawai BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi responden penelitian ini, seluruhnya dijamin melalui teknik sampling jenuh. Gambaran responden dilihat dari empat sisi—jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan masa kerja—yang terangkum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	20	60,6%
	Perempuan	13	39,4%
Usia	25–31 tahun	10	30%
	32–38 tahun	7	21%
	39–45 tahun	5	15%
	46–52 tahun	11	33%
Pendidikan	SLTA/ sederajat	4	12,1%
	Diploma	3	9,1%
	Strata 1 (S1)	25	75,8%
	Strata 2 (S2)	1	3,0%
Masa Kerja	1–8 tahun	18	55%
	9–16 tahun	5	15%
	17–24 tahun	7	21%
	25–32 tahun	3	9%

n = 33

Dilihat dari jenis kelamin, responden laki-laki mendominasi dengan 20 orang (60,6%), sementara responden perempuan berjumlah 13 orang (39,4%), menandakan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadi sampel penelitian ini lebih banyak diisi kaum laki-laki.

Dari sisi usia, kelompok 46–52 tahun menyumbang porsi terbesar dengan 11 orang (33%), disusul rentang 25–31 tahun sebanyak 10 orang (30%), rentang 32–38 tahun 7 orang (21%), dan rentang 39–45 tahun 5 orang (15%). Sebaran ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden tergolong usia produktif dengan bekal pengalaman yang cukup dalam menjalankan pelayanan administrasi kepegawaian.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan, jenjang Strata 1 (S1) paling banyak dijumpai, yakni 25 orang (75,8%), diikuti SLTA/ sederajat 4 orang (12,1%), Diploma 3 orang (9,1%), dan Strata 2 (S2) 1 orang (3,0%). Dominasi lulusan sarjana ini memberi indikasi bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki bekal akademik yang cukup

untuk menunjang pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian secara profesional.

Dari sisi masa kerja, kelompok 1–8 tahun paling dominan dengan 18 orang (55%), diikuti 17–24 tahun sebanyak 7 orang (21%), 9–16 tahun 5 orang (15%), dan 25–32 tahun 3 orang (9%). Sebaran ini menandakan bahwa mayoritas responden telah cukup berpengalaman mengoperasikan sistem informasi kepegawaian sekaligus menjalankan pelayanan administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian

Berikut disajikan tanggapan responden atas ketiga indikator variabel X, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan:

Tabel 2. Jawaban Responden Mengenai Variabel Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian (X)

Pernyataan	TS	KS	CS	S	SS	Total
Kualitas Sistem						
Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian Mudah Digunakan.	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	12 (36%)	20 (61%)	33 (100%)
Data Kepegawaian Dapat Diakses Dengan Cepat.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	13 (39%)	20 (61%)	33 (100%)
Sistem Informasi Kepegawaian Jarang Mengalami Gangguan.	0 (0%)	0 (0%)	4 (12%)	21 (64%)	8 (24%)	33 (100%)
Kualitas Informasi						
Data kepegawaian yang tersedia dalam sistem sudah akurat dan benar.	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	22 (67%)	10 (30%)	33 (100%)
Informasi kepegawaian yang tersedia sudah lengkap dan relevan.	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	19 (58%)	13 (39%)	33 (100%)
Pembaruan data kepegawaian dilakukan tepat waktu.	0 (0%)	0 (0%)	3 (9%)	14 (42%)	16 (49%)	33 (100%)
Kualitas Layanan						
Admin sistem selalu siap memberikan bantuan teknis.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (55%)	15 (45%)	33 (100%)
Pegawai mendapatkan pelatihan yang cukup dalam menggunakan sistem	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	22 (67%)	10 (30%)	33 (100%)

informasi.						
Keluhan atau masalah terkait sistem ditangani dengan cepat dan responsif.	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	18 (55%)	14 (42%)	33 (100%)

Sumber Data: Analisis Data Primer 2026

Merujuk model DeLone dan McLean (2003), variabel kualitas sistem informasi kepegawaian diukur lewat tiga indikator: kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Pada indikator kualitas sistem,

Beralih ke indikator kualitas informasi, mayoritas responden menilai bahwa data yang dihasilkan sistem mudah dipahami,

Terakhir pada indikator kualitas layanan, sebagian besar responden merasakan bahwa dukungan yang diberikan seputar penggunaan sistem informasi kepegawaian sudah berjalan cukup baik.

Dapat disimpulkan, penilaian responden terhadap kualitas sistem informasi kepegawaian di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung positif, kendati beberapa sisi masih membutuhkan penyempurnaan.

2. Efektivitas Pelayanan Administrasi ASN

Tanggapan responden atas ketiga indikator variabel Y—pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi—disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Jawaban Responden Mengenai Variabel Efektivitas Pelayanan Administrasi ASN (Y)

Pernyataan	TS	KS	CS	S	SS	Total
Pencapaian Tujuan						
Pelayanan Administrasi ASN Diselesaikan Sesuai Waktu Yang Ditentukan.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17 (52%)	16 (48%)	33 (100%)
Proses administrasi kepegawaian berhasil diselesaikan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.	0 (0%)	0 (0%)	2 (6%)	19 (58%)	12 (36%)	33 (100%)
Pelayanan administrasi yang diberikan sudah akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	21 (64%)	11 (33%)	33 (100%)
Integrasi						
Koordinasi antar unit di BKPSDM berjalan	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	16 (49%)	17 (51%)	33 (100%)

dengan baik dalam memberikan pelayanan administrasi.						
Komunikasi Antar Pegawai Di BKPSDM Berlangsung Secara Efektif.	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	17 (51%)	15 (46%)	33 (100%)
Unit Di BKPSDM Bekerja Sama Dengan Baik Dalam Melayani Kebutuhan Administrasi ASN.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (55%)	15 (45%)	33 (100%)
Adaptasi						
BKPSDM Mampu Menyesuaikan Pelayanan Dengan Cepat Ketika Ada Perubahan Regulasi Kepegawaian.	0 (0%)	0 (0%)	1 (3%)	20 (61%)	12 (36%)	33 (100%)
Pelayanan Administrasi Di BKPSDM Sudah Fleksibel Dalam Memenuhi Kebutuhan ASN.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (55%)	15 (45%)	33 (100%)
BKPSDM Dapat Merespons Dengan Baik Terhadap Perubahan Dinamika Kepegawaian.	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (55%)	15 (45%)	33 (100%)

Sumber Data: Analisis Data Primer 2026

Mengacu tiga indikator Pennings dan Steers (1977)—pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi—berikut gambaran efektivitas pelayanan administrasi ASN yang terekam. Pada indikator pencapaian tujuan,

Selanjutnya pada indikator integrasi, koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antarpegawai dalam menjalankan pelayanan administrasi tampak sudah berjalan dengan baik.

Dengan demikian, efektivitas pelayanan administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kategori baik, sekalipun masih menyisakan ruang perbaikan pada beberapa sisi pelayanan.

C. Uji Asumsi Klasik

Sebelum model regresi linear sederhana dipakai untuk menguji hipotesis, kelayakannya perlu

dipastikan lebih dahulu lewat serangkaian uji asumsi klasik.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas (K-S)	Sig. 0,000 (Test Statistic 0,219)	$n \geq 30 \rightarrow$ CLT	Residual mendekati normal
Multikolinearitas	Tolerance 1,000; VIF 1,000	Tolerance $> 0,10$; VIF < 10	Tidak ada multikolinearitas
Heteroskedastisitas (Glejser)	Sig. 0,561	Sig. $> 0,05$	Tidak ada heteroskedastisitas
Autokorelasi (Durbin-Watson)	DW 1,747	dU 1,4805 $<$ DW $<$ 4-dU 2,5195	Tidak ada autokorelasi

Uji normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov memperlihatkan Test Statistic sebesar 0,219

Beralih ke uji multikolinearitas, variabel Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian (X) tercatat memiliki nilai Tolerance 1,000

Pada uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser, variabel Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian memperoleh signifikansi 0,561

Terakhir, uji autokorelasi Durbin-Watson menghasilkan nilai 1,747.

D. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Sederhana dan Uji t

Variabel	Koefisien	t hitung	t tabel	Sig.
Konstanta	0,382	—	—	—
Kualitas SI Kepegawaian (X)	0,997	9,958	2,040	0,000

$R^2 = 0,762$ (kontribusi X terhadap Y sebesar 76,2%)

$$Y = 0,382 + 0,997X$$

Dari persamaan regresi di atas, nilai konstanta 0,382 mengandung makna

E. Koefisien Determinasi (R^2)

Besar sumbangan variabel Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi ASN dilihat lewat koefisien determinasi, yang dalam penelitian ini menghasilkan nilai R Square (R^2) sebesar 0,762.

F. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t (parsial) diterapkan untuk mengecek apakah Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian berpengaruh secara signifikan

Berdasarkan hasil tersebut, H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu

Sungai Selatan. Dengan demikian, semakin baik kualitas sistem informasi kepegawaian yang diterapkan, maka efektivitas pelayanan administrasi ASN juga akan semakin meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang baik mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi ASN secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kualitas sistem informasi kepegawaian berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan—artinya, semakin baik kualitas sistem informasi yang diterapkan, semakin tinggi pula efektivitas pelayanan administrasi ASN yang dihasilkan. Besarnya kontribusi kualitas sistem informasi terhadap efektivitas pelayanan yang tergolong kuat turut menegaskan bahwa sistem informasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi yang efektif.

Temuan ini selaras dengan gagasan DeLone dan McLean (2003) yang menobatkan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan sebagai penentu utama sukses-tidaknya sebuah sistem informasi.

Ditilik dari indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, capaian efektivitas pelayanan administrasi ASN pada penelitian ini tergolong baik.

Temuan ini turut menguatkan hasil Laia et al. (2022) dan Rohaimudin et al. (2025), yang senada menyimpulkan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bertitik tolak dari hasil penelitian, kualitas sistem informasi kepegawaian terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN di BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan—sebuah simpulan yang ditopang hasil regresi linear sederhana dan uji hipotesis,

Angka koefisien determinasi memperlihatkan sumbangan kualitas sistem informasi kepegawaian sebesar 76,2% terhadap efektivitas pelayanan administrasi ASN,

Saran

Mengacu pada temuan di atas, BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu terus membenahi kualitas sistem informasi kepegawaian,

Untuk riset mendatang, ada baiknya cakupan penelitian diperluas dengan menyertakan variabel lain yang berpotensi turut menjelaskan efektivitas pelayanan administrasi ASN,

5. REFERENSI

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of*

- Management Information Systems, 19(4), 9–30.
- Jogiyanto, H. M. (2008). Analisis dan desain sistem informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Khaerullah, H. E. (2023). Efektivitas pemanfaatan aplikasi sistem informasi manajemen barang dan kekayaan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(2), 431–444.
- Laia, O., Halawa, O., & Lahagu, P. (2022). Pengaruh sistem informasi manajemen terhadap pelayanan publik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 70–76.
- Pennings, J. M., & Steers, R. M. (1977). Organizational effectiveness: A behavioral view. *Administrative Science Quarterly*, 22(3), 538–540.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
- Pratama, R. (2024). Analisis kesuksesan website BKPSDMD Kota Jambi menggunakan model Delone dan McLean. *ZONasi: Jurnal Sistem Informasi*, 6(3), 721–733.
- Rohaimudin, I., & Aulia, S. (2025). Efektivitas SIMPEG dalam manajemen sumber daya manusia di BKPSDM Kota Serang. *Jurnal Inovasi dan Teknologi Pendidikan (JURINOTEP)*, 4(1), 40–47.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2013). Prinsip-prinsip manajemen (J. Smith D.F.M., Terjemahan). Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.